



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

**REVISI SK PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA
BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

Menimbang : a. mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalsel Nomor 5 Tahun 2026, tanggal 11 Maret 2026;
b. bahwa dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana dalam Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, sehingga dipandang perlu melakukan Revisi SK Pembentuk Tim Sekretariat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada BPMP Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembersihan Korupsi;
5. Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Menpan RB Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP); dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026 TENTANG REVISI SK PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalsel Nomor 5 Tahun 2026, tanggal 11 Maret 2026.
- KEDUA : Membentuk Tim Sekretariat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.
- KETIGA : Tim Sekretariat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud bertugas:
- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud;
 - c. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanidi lingkungan BPMP Prov. Kalsel;
 - d. Melaksanakan koordinasi, interasi, sinkronisasi serta kerjasama dengan Tim Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Sekretriat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanidi lingkungan BPMP Prov. Kalsel. Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Mei 2026



KEPALA,

SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
REVISI SK PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM SEKRETARIAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Dr.Santoso,S.Pd.,M.Si	Kepala	Pengarah
2	Sucipto	Kasubbag Umum	Pembina
3	Adi Cahyono,S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
4	Oktoviyen Catur Hariyanto,A,Md	Pengelola Data dan Informasi	Sekretaris
5	Sigit Handoko, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
1. Tim Manajemen Perubahan			
1	Achmad Mauluddin, S.Kom., M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Koordinator
2	Akhmad Gafuri, S.Pd., M.Pd.	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
3	Imam Mustofa, S.P., M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
4	Abdullah Husaini,S.Pd	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
5	Sumiyati, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Fathanah, S.Pd., M.Pd.	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
7	Abdillah Basrahil, S.Pd.I.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8	Rifa Dhiya Husna,A.Md.Ds	Arsiparis Terampil	Anggota
9	M. Hadriansyah,S.Ak	Penata Layanan Operasional	Anggota
10	Joko Asih	Operator Layanan Operasional	Anggota

2. Tim Penataan Tata Laksana			
1	Munirah, S.Si., M.Pd.	Widyaprada Ahli Pertama	Koordinator
2	Dra. Supiani Obrang Ruswati, M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
3	Abdurrahman,M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
4	Een Marliani,S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Rini Widiastuti, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Muftihidayati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7	Risda Amalia, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8	Muhammad Topan, S.Ak	Penata Layanan Operasional	Anggota
9	Hendrayani,S.E	Penata Layanan Operasional	Anggota
3. Tim Penataan SDM			
1	Nurul Amini, S.Pd., M.Pd.	Widyaprada Ahli Muda	Koordinator
2	Dra. Nunung Nurazizah, M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
3	Andini Puspa Dewi, S.Pd.AUD	Widyaprada Ahli Pertama	Anggota
4	Fahruraji, S,Kom	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Fatimah, S.Sos	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
6	Muhammad Jazuli, S.Kom., M.Kom.	Widyaprada Ahli Pertama	Anggota
7	Dwi Pramadia Sarno,A.Md.Kom	Pranata SDM Aparatur Terampil	Anggota
8	Ria Agustin, S.E	Penata Layanan Operasional	Anggota
9	Supriyanto	Operator Layanan Operasional	Anggota
10	Yahya Purwadi	Operator Layanan Operasional	Anggota
4. Tim Akuntabilitas			
1	Ari Kesnawati,S.Pd, M.S	Widyaprada Ahli Muda	Koordinator
2	Evarianty Masfini, ST	Widyaprada Ahli Pertama	Anggota
3	Isma Amarullah, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Rahmiaty,S.E	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
5	Septi Purnama Sari, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Muhammad Junaidi, S.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
7	Fajar Triatma, S.IP.Info.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8	Abdul Gafar, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
9	Roby Suganda	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

5. Tim Penguatan Pengawasan

1	Siti Ramlah,S.Pd, M.S.	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator
2	M.Jahwari,S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	dr. Ridha Rosyanti, M.Kes	Dokter Ahli Muda	Anggota
4	Mujiannur, S.Sos., M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
5	Ida Rusita, S.Kom	Pengelola Sistem dan Tehnologi Informasi	Anggota
6	Wulan Surandika, S.Pd., M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
7	Adiya Rachman, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
8	Moniroh Monika, A.Md	Arsiparis Mahir	Anggota
9	Hagi Ismail	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10	Rolly Rifky	Operator Layanan Operasional	Anggota

6. Tim Peningkatan Kualitas Layanan Publik

1	Husna Rusdiani,S.Kom	Pengelola Sistem dan Tehnologi Informasi	Koordinator
2	Mursyidah, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Lis Maulina, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
4	Susilowati,M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
5	Drs. Aniyoga Prawoto, M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
6	M.Hafiz	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7	Gt.Salma Assyifa Balela, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
8	Muhammad Rafsanjani, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
9	Ahmad Yusuf	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

